



Eksistensi dan Partisipasi Perempuan Muslim dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Jawa Barat

Masripah

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Garut

Abstrak. Eksistensi dan partisipasi perempuan dalam gerak pembangunan sumber daya manusia di Jawa Barat dalam berbagai bidang pendidikan, sosial, kesehatan, politik dan keluarga nampaknya belum optimal. Penyebabnya sangat variatif, mulai dari persoalan marginalisasi, stereotype, subordinasi, misoginis, violence, domestik, publik, dan diskriminasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan eksistensi dan partisipasi perempuan Muslim di Jawa Barat, berperan mewujudkan pesan-pesan agama dalam pelbagai kehidupan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Respon perempuan Muslim Jawa Barat terhadap permasalahan kaum perempuan yaitu mendukung berbagai kebijakan UU yang berpihak terhadap kaum perempuan. Perempuan Muslim Jawa Barat terus membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam mewujudkan keberpihakan terhadap kemajuan kaum perempuan.. Sedangkan tantangan perempuan muslim yaitu tingginya kemiskinan kaum perempuan serta perempuan yang pendidikan tinggi belum memperlihatkan peran partisipatifnya secara signifikan. Keberagaman perempuan Muslim dapat dilihat dari aspek ketaatan beragama yang diimplementasikan dalam ketaatan terhadap ajaran Islam yang meliputi kesolehan sosial dan kesolehan ritual.

Kata kunci: keberpihakan, kebijakan, eksistensi, perempuan, muslim

1. Pendahuluan

Eksistensi dan partisipasi perempuan Muslim dalam gerak pembangunan daerah terutama dalam pengembangan sumber daya manusia didalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, politik dan keluarga dirasa belum optimal. Hal ini terjadi karena adanya stereotip (Setiadi, & Kolip, 2011) bahwa perempuan merupakan makhluk lemah, *pondok langkah* (istilah Sunda) (Tamsyah, 2001) serta anggapan sosial yang menempatkan kaum perempuan emosional, irasional dalam berpikir, dan tidak dapat tampil sebagai pemimpin (sebagai pengambil keputusan) telah menempatkan kaum perempuan dalam posisi yang subordinat (Setiadi, & Kolip, 2011).

Selain itu keterkaitan perempuan dengan wilayah reproduksi merupakan penyebab posisinya yang subordinat dalam angkatan kerja berupah, Perbedaan gender dalam dunia kerja pun bergaung sampai ke rumah tangga, yang mana perempuan sering harus menangani tugas seputar memasak, bersih-bersih, mengasuh anak, memberikan dukungan emosional, dan semacamnya. Pada gilirannya, status dan upah rendah bagi pekerjaan kaum perempuan, yang pada umumnya dianggap “tak terampil”, menyebabkan mereka tergantung secara ekonomis pada pendapatan kaum laki-laki, dan semakin mengukuhkan tanggungjawab perempuan atas tugas rumah tangga dan pengasuhan anak (Beiharz, 2005). Namun seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan dan peranan perempuan tidak hanya sebatas dalam lingkup keluarga saja. Pada era globalisasi ini

sudah terjadi pergeseran budaya dalam segala bidang, termasuk peran serta perempuan, dimana perempuan bukan hanya sebagai objek/ partner pasif, namun dituntut berperan dan bertanggungjawab yang setara dengan laki-laki. Hal tersebut memang tidaklah mudah, dibutuhkan beberapa aspek yang berpengaruh terhadap peran serta perempuan dan aktivitasnya, salah satu aspek yang paling penting tersebut yaitu tingkat pendidikan.

2. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi pada masyarakat. Sumber data utama yang digunakan adalah studi literature dan pemahaman peneliti atas objek yang diteliti. Pola penelitian mengikuti sistematika penelitian yang direkomendasikan oleh Ramdhani & Ramdhani (2014) dan Ramdhani et. al. (2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Secara umum partisipasi perempuan dalam organisasi perempuan sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari tiga jenis organisasi yaitu: pertama organisasi yang bersifat produktif yang bertujuan menghasilkan pendapatan; kedua, organisasi kemasyarakatan yang bertujuan menghasilkan pelayanan pada masyarakat; dan ketiga, organisasi yang bersifat politik yaitu yang berorientasi pada salah satu partai politik. Partisipasi perempuan memang menghadapi banyak kendala, kendala utamanya yaitu kegiatan rumah tangga yang umumnya menyita banyak perhatian dan tenaga, dan adanya kerancuan dalam menyikapi ajaran agama mengenai hak dan kewajiban perempuan.

Perempuan di Indonesia ternyata mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari bidang-bidang penting yang masih jauh dari harapan, perjuangan kaum perempuan itu bisa dilihat dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Diskriminasi di bidang pendidikan bisa kita temukan melalui angka putus sekolah dengan prosentase lebih tinggi, bila dibandingkan dengan angka putus sekolah yang terjadi pada kaum laki-laki. Berdasarkan sampel data Susenas 2011, sebanyak 14.642 siswa usia 7-15 tahun yang bertempat tinggal di Jawa Barat dengan sebaran berdasarkan status sekolah, yaitu putus sekolah sebanyak 497 siswa (3,39 persen) dan masih sekolah sebanyak 14.145 siswa (96,61 persen). Sebanyak 7.574 siswa (51,73 persen) diantaranya berjenis kelamin laki-laki sedangkan sisanya 7.068 siswa (48,27 persen) berjenis kelamin perempuan (Biro Pusat Statistika, 2012). Sementara dalam bidang ekonomi, kaum perempuan tak dapat menikmati hasil pembangunan sebagaimana kaum laki-laki. Ibu-ibu atau perempuan lebih banyak berkutat dengan rutinitas mengasuh, mendidik dan membesarkan anak serta melayani suami di rumah. Inilah diantaranya yang membuat kaum perempuan tidak punya waktu berkreatifitas seperti kaum laki-laki.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, profil perempuan Indonesia yang mengenyam pendidikan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Menurut data yang diperolehnya pada tahun 2011, untuk remaja usia 15 tahun ke atas pelajar yang menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun untuk perempuan jumlahnya 90,5 persen dan laki-laki mencapai 95,35 persen (Amalia, 2012). Kaum perempuan dipandang dari berbagai sisi masih sering mendapat perlakuan yang tidak adil karena kedudukan perempuan khususnya di Indonesia masih mengalami subordinasi, perendahan, pengabaian, eksploitasi, dan pelecehan seksual, bahkan tindak kekerasan (Susanti, 2000). Peran dan dukungan pemerintah dalam berbagai program pembangunan merupakan aspek determinan untuk mencapai keberhasilan pembangunan (Ramdhani & Santosa, 2012), termasuk pembangunan eksistensi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Arief Rachman, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), terdapat lima masalah yang menghalangi perempuan untuk mengenyam pendidikan dan berkarier yaitu kultur yang menomorduakan perempuan, sistem struktur sekolah kurang memberikan kesempatan bagi perempuan, lemahnya kesetaraan gender, manajemen rumah tangga belum seimbang, perempuan lebih mengalah, kesepakatan pasangan yang melemahkan perempuan.

- a. Kultur yang menomorduakan perempuan.
Perempuan Indonesia punya semangat tinggi untuk berpendidikan, namun masih sangat menghormati kultur patriarki. Kultur yang terinternalisasi di masyarakat inilah, yang lantas membuat perempuan dinomorduakan untuk akses pendidikan. Sayangnya, kultur ini juga diikuti dan bahkan diterima oleh masyarakat luas sebagai sesuatu yang wajar, bahkan oleh perempuan itu sendiri.
- b. Sistem struktur sekolah kurang memberikan kesempatan bagi perempuan.
Banyak pendapat masyarakat yang menunjukkan wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Perempuan hanya diberi porsi berbagai peran domestik, di rumah tangga. Lebih berbahayanya, virus ini masih juga meluas di sekolah. Pendapat yang mengatakan perempuan tak perlu sekolah tinggi menjadi virus yang masih menyebar di sekolah, dalam sistem struktur sekolah.
- c. Lemahnya kesetaraan gender
Kesetaraan gender belum diusung berbagai kebijakan yang ada pada lembaga negara. Akhirnya perwujudan kesetaraan gender masih lemah. Diperlukan resolusi politik yang mendukung dan mengusung kesetaraan gender yang tertuang dalam kebijakan lembaga negara. Peraturan di daerah misalnya, masih banyak yang belum mengusung kesetaraan dan keadilan gender dari segi gaji perempuan dan laki-laki. Cuti kepada lelaki saat istri melahirkan juga belum diusung dalam peraturan daerah, padahal peran ayah dibutuhkan pada masa melahirkan.
- d. Manajemen rumah tangga belum seimbang, perempuan lebih mengalah
Perempuan cenderung mengalah untuk mengurus anak dan keluarga. Akhirnya, keinginan untuk meraih gelar S2 atau S3, misalnya, tertunda atau bahkan dibatalkan demi peran sebagai ibu. Dengan adanya manajemen rumah tangga yang lebih baik, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama. Baik dalam mengurus rumah tangga maupun dalam mengembangkan dirinya untuk bersekolah.
- e. Kesepakatan pasangan yang melemahkan perempuan
Saat masih berpasangan, pada kasus tertentu, masih terdapat perempuan yang terbatas untuk mengembangkan diri. Misalnya, pria akan menikahinya, dengan memberi syarat ia harus mengurus rumah tangga saja. Kesepakatan pasangan yang dibuat sebelum menikah, bahkan menjadi syarat menikah, lantas membuat perempuan terbatas gerakannya. Masalah semacam ini tidak lantas terjadi pada setiap orang, dan sifatnya berbeda setiap kasus. Prinsipnya, ada kesepakatan tertentu yang dibuat untuk perempuan yang kemudian membatasi ruang gerak dan kemandiriannya untuk berkembang. "Persoalan kesetaraan gender perlu diatasi tidak hanya dari sisi kultural, namun juga perlu ada kebijakan yang tertuang dalam struktur (Rahman, 2010).

Dalam realitas kehidupan sehari-hari, perbedaan gender ternyata banyak melahirkan berbagai bias dan ketidakadilan, terutama sering menimpa kaum perempuan. Ketidakadilan gender tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk misalnya marginalisasi perempuan, subordinasi perempuan, stereotip atau pelabelan negative sekaligus perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan beban kerja lebih banyak dan panjang.

- a. **Marginalisasi Perempuan**
Marginalisasi kaum perempuan terjadi akibat adanya diskriminasi terhadap pembagian kerja menurut gender. Ada jenis pekerjaan tertentu yang dianggap cocok untuk perempuan karena keyakinan gender. Karena perempuan dianggap tekun, sabar dan ramah maka pekerjaan yang cocok bagi mereka adalah sekretaris, perawat atau suster, pramugari, kasir guru TK atau resepsionis. Pekerjaan-pekerjaan yang dianggap peminim itu selalu dinilai lebih rendah bila dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap maskulin. Secara otomatis gaji yang diterima oleh profesi-profesi yang dianggap peminim itu lebih rendah dari profesi-profesi yang dianggap maskulin.
- b. **Subordinasi Perempuan**
Sebagai kelanjutan bahwa perempuan adalah makhluk yang emosional, maka dipandang tidak bisa memimpin dan karena itu ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Hal ini melahirkan subordinasi bagi perempuan. Bentuk subordinasi bermacam-macam, berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain, dari waktu ke waktu dan dari budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Misalnya, Budaya Jawa masa lalu menganggap bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, akhirnya akan ke dapur. Dalam banyak keluarga, perempuan menjadi pilihan pertama untuk tidak disekolahkan jika suatu keluarga mengalami kendala biaya.
- c. **Stereotip Jenis Kelamin**
Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip itu adalah bersumber dari pandangan yang bias gender. Contoh stereotip itu adalah bahwa perempuan merupakan makhluk pesolek. Perempuan bersolek diasumsikan untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Karena itu jika kemudian terjadi kasus kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan, maka akan selalu dikaitkan dengan pelabelan tersebut. Artinya, masyarakat akan cenderung menyalahkan perempuan yang menjadi korban karena dialah yang menjadi penyebab pertama terjadinya pelecehan seksual.
- d. **Beban Kerja Lebih Berat**
Adanya anggapan bahwa perempuan secara alami mempunyai sifat rajin, teliti, lemah lembut, pemelihara dan penyayang menyebabkan mereka dianggap paling cocok untuk bekerja mengurus rumah tangga (pekerjaan domestik). Akibat semua pekerjaan domestik menjadi tanggungjawabnya, maka beban pekerjaan perempuan menjadi lebih berat. Sebagai contoh, pada kalangan keluarga miskin, beban kerja perempuan menjadi berlipat ganda; di samping harus membereskan urusan rumah tangga, mereka juga harus membantu bekerja di luar rumah untuk membantu mencari nafkah tambahan bagi keluarganya. Ketidakadilan sangat tampak ketika realitasnya beban kerja domestik lebih berat, paling tidak waktu yang digunakan lebih lama, tetapi sama sekali tidak dihargai secara ekonomis, bahkan status sosialnya dalam masyarakat di pandang rendah dari pekerjaan publik.
- e. **Kekerasan terhadap Perempuan**
Kekerasan yang menimpa perempuan pada umumnya disebabkan karena adanya pandangan gender. Bentuk kekerasannya berupa kekerasan fisik maupun non fisik yang terjadi di tingkat rumah tangga, masyarakat, negara bahkan dalam tafsir agama. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah pemerkosaan dalam perkawinan. Dalam pemahaman bahwa perkosaan adalah suatu hubungan seksual di mana salah satu pihak tidak menghendakinya, maka sangat mungkin perkosaan terjadi dalam kehidupan suami istri. Banyak kaum ibu yang menyatakan sering merasa enggan berhubungan seksual dengan suaminya karena capekan tetapi toh tetap melayaninya, Ketidakrelaan ini tidak mereka ekspresikan kepada suami karena berbagai faktor, yang pada umumnya dipengaruhi oleh budaya gender. Budaya gender yang disupport oleh pemahaman agama mengajarkan bahwa istri harus selalu

menyenangkan suami, melayani dan mematuhi betapapun sesungguhnya sang istri tidak sedang ingin melakukannya (Prasetyo, & Marjuki, 1997).

Sedangkan menurut Setiadi, & Kolip (2011), bahwa kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan ini dapat dilihat dari:

- a. Masih rendahnya peluang kaum perempuan untuk bekerja dan berusaha di sector formal.
- b. Rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja, Ketidakadilan.
- c. Ketidakadilan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dimana walaupun perempuan telah terlibat dalam pekerjaan produksi, tetapi kerja reproduksi di dalam rumah tetap menjadi beban perempuan.
- d. Rendahnya posisi perempuan di ranah sosial-politik dibanding dengan kaum laki-laki.
- e. Tingginya penghasilan perempuan di dalam keluarga yang kenyataannya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, tetapi besar penghasilan tersebut masih dianggap penghasilan tambahan atau cadangan.

Karena peran ganda yang dilakukan kaum perempuan itulah maka target quota 30% jatah politik perempuan dalam bidang politik pada pemilihan umum (pemilu) legislatif tahun 2004 tidak mencapai target. Dan itu bisa dibuktikan dengan angka keterwakilan kaum perempuan di parlemen hanya 12% dari 550 kursi yang tersedia di DPR-RI. Atau hanya 22 kursi yang bisa di isi perempuanseskarang. Sebuah realitas yang sangat berat buat perjuangan perempuan memperbaiki keadaan bangsa melalui kekuatan yang dimilikinya. Jangankan memperbaiki bangsa, untuk memperjuangkan nasib dan harkat kaum sendiri saja terasa sulit.

Masalah perempuan adalah rendahnya keterwakilan perempuan di berbagai lembaga politik formal. Ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab perempuan terkucilkan dari lembaga politik. Mulai dari kendala budaya dan tafsir agama, ekonomi, dukungan keluarga, hingga system politik itu sendiri yang memang tidak ramah terhadap perempuan. Bila dipetakan terdapat dua kendala besar: *kultural* dan *structural*. Sistem nilai dan budaya (*kultural*) yang kemudian mendapat pembenaran oleh agama menempatkan perempuan sebagai istri dan ibu yang harus betah berada di rumah, karena ia harus mengurus anak dan melayani suami (Mulia, & Farida, 2005). Budaya merupakan aspek penting yang dapat mempegaruhi pola kehidupan (Ramdhani, et. al., 2017).

Perempuan Indonesia tertinggal di dalam kehidupan publik. Kesenjangan gender yang senantiasa muncul dalam indikator sektor sosial menjadi sebuah tantangan berskala nasional. Indonesiamemiliki angka melek huruf yang tinggi pada orang dewasa yaitu sebesar 92 persen, namun perempuan jumlahnya mencapai 63% dari 7,7 juta orang yang masih buta huruf. Tingkat kematian ibu juga tinggi yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup, yang masih menjadi salah satu yang tertinggi di kalangan negara-negara ASEAN. Angka harapan hidup pada tahun 2008 adalah 71 tahun untuk perempuan dan 67 tahun untuk laki-laki. Partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja masih 49 persen jika dibandingkan dengan 80,2 persen laki-laki. Di antara perempuan yang bekerja di sektor pemerintahan, kurang dari 1 persennya menduduki posisi eselon atas dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif hanya 18 persen (Bari, 2010).

Perempuan terwakilkan secara marjinal di mahkamah agung dan pengadilan tinggi. Pada tahun 2010, tidak ada satu pun perempuan yang bekerja sebagai hakim di mahkamah agung Indonesia. Hanya ada enam orang perempuan (15,8 persen) di eselon dua di mahkamah agung. Di peradilan sipil, dari 3.104 hakim, 2.352 hakim adalah laki-laki (76 persen) sementara 752 orang hakim perempuan yang ada mengambil 24 persen dari jumlah keseluruhan (Bari, 2010).

Di akhir tahun 2009, hanya satu dari 33 orang gubernur terpilih adalah perempuan (Gubernur Provinsi Banten), dan hanya satu perempuan yang terpilih sebagai wakil gubernur (Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah). Pada tahun yang sama dari 440 kabupaten/kota, terdapat 10 Bupati/Walikota (2,27 persen). Empat ratus dua (402) posisi Wakil Bupati/Walikota, 12 (atau 2,27 persen) adalah perempuan (berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, meskipun terdapat 38 posisi untuk Wakil Bupati/Walikota yang namanya tidak tersedia) (Bari, 2010).

Sektor pelayanan publik, ada sebuah masalah serius mengenai rendahnya keterwakilan perempuan di posisi-posisi tertinggi. Jumlah perempuan yang ada di sektor ini mencapai rata-rata 45,4 persen namun posisi eselon tertinggi diduduki oleh laki-laki. Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi gender di pegawai negeri pada eselon 1, 2, 3 dan 4. Kesenjangan gender pada tingkatan ini tidak terlalu lebar; namun kesenjangan pada eselon 1 menjadi semakin serius. Hanya 9 persen dari perempuan pegawai negeri berada di posisi eselon satu yang mana jumlah tersebut meliputi hanya 0,5 persen dari keseluruhan perempuan yang kerja di sektor ini.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga yang amat didominasi oleh laki-laki. Kecuali seorang komandan perempuan di kepolisian regional di Provinsi Banten sejak tahun 2008, belum ada lagi petugas senior kepolisian. Mayoritas perempuan di lembaga ini berada di jajaran petugas tingkat empat dan secara keseluruhan hanya 3,5 persen perempuan bekerja di satuan kepolisian.

Departemen Pertahanan menunjukkan bahwa tidak ada satu pun pegawai negeri perempuan di eselon 1 dan 2, dan tidak ada jenderal perempuan bintang 1 hingga 4 yang memegang kepemimpinan di Angkatan Darat, Laut maupun Udara, Ini juga berlaku di kalangan purnawirawan. Di jajaran perwira tingkat menengah (Mayor, Letnan Kolonel dan Kolonel) hanya 14 persen diantaranya perempuan (Bari, 2010).

Berdasarkan penelitian dari Women Research Institute, bahwa di 9 kabupaten yang tersebar di 7 provinsi di Indonesia ditemukan bahwa representasi perempuan dalam lembaga pembuatan kebijakan ditingkat lokal (kabupaten, kota, dan desa) sangat rendah (Soetjipto, 2011).

Pekerjaan untuk perempuan selama ini lebih banyak di bidang-bidang terkait dengan sifat feminim. Yakni, bidang yang membutuhkan kelembutan, kesabaran, ketelitian, ketekunan. Bentuk-bentuk kerja feminisme ini dianggap lebih rendah daripada bentuk kerja maskulin yang dicerminkan dalam wujud kecerdasan intelektual, kekuatan otot, keberanian, berfikir rasional, dan sebagainya. Akibatnya upah yang diterima perempuan lebih rendah dari upah laki-laki. Dari sinilah, pemiskinan perempuan tercipta (Muhammad, 2011).

Tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran, dan kelangkaan lapangan kerja di negeri ini telah mendorong dan menggerakkan banyak perempuan Indonesia, terutama remaja perempuan, untuk menyerah dan tidak berdaya secara total kepada siapa saja yang “berjasa” memberikan pekerjaan, apapun bentuknya. Hal ini pada gilirannya membuka ruang bagi banyak orang untuk melakukan trafficking. Disamping itu, faktor utama terjadinya trafficking adalah masih kuatnya budaya patriarkhi. Perempuan di dalam budaya ini dianggap sangat tergantung kepada laki-laki, dan sebagainya (Nirmila, 2013). Untuk menghindari bentuk trafficking, perlu dilakukan peningkatan derajat pendidikan perempuan yang juga memuat pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan pengembangan kemampuan pada pembelajar untuk berperilaku baik yang ditandai dengan perbaikan berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang

berketuhanan (tunduk patuh pada konsep ketuhanan), dan mengemban amanah sebagai pemimpin di dunia (Ramdhani, 2014; Ramdhani & Muhammadiyah, 2015)

Selain masalah di atas, pemerintahan Indonesia melalui Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan memprediksikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan perempuan. Kendala tersebut terdapat dalam hampir semua bidang dan aspek pembangunan: pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum dan hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, kelembagaan pemerintah dan masyarakat, bahkan juga dalam bidang agama. Khususnya dalam bidang agama, masalah utama yang dihadapi:

- a. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama yang berkaitan dengan peran dan fungsi perempuan.
- b. Masih banyaknya penafisiran ajaran agama yang merugikan kedudukan dan peranan perempuan. Sebagai contoh, pemahaman agama yang bias gender yang membawa implikasi kepada ketimpangan gender adalah: *Pertama*, pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia. Bahwa Hawa, selaku perempuan pertama, tercipta dari bagian tubuh laki-laki, yaitu Adam a.s., yang akhirnya perempuan itu diposisikan subordinat dari laki-laki. Dia hanyalah *the second human being*, manusia kelas dua. Perempuan bukanlah makhluk yang penting; dia hanyalah makhluk pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki. Konsekuensinya, perempuan tidak pantas berada di depan, tidak pantas menjadi pemimpin, dan seterusnya. *Kedua*, contoh pemahaman diatas pada gilirannya membawa pada pandangan bahwa posisi dan kedudukan perempuan memang rendah, yakni lebih rendah daripada laki-laki. Menarik digarisbawahi di sini, bahwa pemahaman keagamaan yang bias tersebut justru diaturoleh mayoritas umat beragama, tak terkecuali di kalangan umat Islam Indonesia (Mulia, 2005).

Di Propinsi Jawa Barat masih terdapat permasalahan kaum perempuan diantaranya:

- a. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat dimaknai secara kuantitatif terhadap meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Selain itu, akan mewarnai substansi kebijakan pembangunan yang responsif gender. Keterwakilan Perempuan dalam demokrasi bukan sekedar untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, namun seharusnya menjadi pembelajaran demokrasi bagi kaum perempuan. Keterwakilan perempuan dalam parlemen juga memberikan kontribusi terhadap modal sosial untuk memicu terjadinya struktur kekuasaan yang lebih akomodatif terhadap aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan kepentingan perempuan. Namun dilihat dari hasil pengamatan bahwa keterwakilan kaum perempuan sebagai calon legislative masih terlihat dipaksakan sebab belum menunjukkan kualitas kaum perempuan itu sendiri tetapi kedekatan familier. Hal ini dapat dilihat dari keterwakilan kaum perempuan dalam dunia politik di Jawa Barat pada tahun 2014.
- b. Di Jawa Barat pada 2011 lalu terdapat kurang lebih 17.000 kasus KDRT yang mayoritas terjadi di Kab Bandung. Keterbatasan pendidikan, ekonomi dan pemahaman peran istri yang hanya berperan di *sumur*, *dapur*, dan *kasur* menjadi pemicu utama berbagai kasus KDRT terhadap perempuan. Jadi sangat jelas bahwa bahwa Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor. Diantaranya ada faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut ambil andil dalam sebuah rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan misalnya minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pengembangan pendidikan perempuan dapat dilakukan dengan intervensi lingkungan pendidikan, yang mendorong pada keinginan perempuan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Lingkungan pendidikan merupakan aspek

- penting yang mempengaruhi sikap seseorang dalam menjalankan pendidikan dan derajat keberhasilannya (Ramdhani, 2014).
- c. Di Propinsi Jawa Barat masih terdapat korban trafficking yang tinggi dengan jumlah korban trafficking sebanyak 166 orang (tahun 2011). Hal ini tidak dapat dipungkiri jika melihat pada aspek makro seperti kondisi ekonomi, kependudukan, sosial, budaya dan hukum. Misalnya ketidakseimbangan jumlah pencari kerja dengan ketersediaan lowongan kerja akan mendorong mereka mencari peluang kerja keluar propinsi bahkan keluar negeri. Selanjutnya, peningkatan sektor industri yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan cenderung berkorelasi dengan peningkatan kasus pelecehan, penipuan, dan angka tindak kekerasan terhadap kaum perempuan.
 - d. Permasalahan pembangunan manusia yang dihadapi Propinsi Jawa Barat sebenarnya relatif hampir sama dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Masih relatif lambatnya perkembangan IPM di Propinsi Jawa Barat, utamanya disebabkan karena tingginya disparitas kualitas sumber daya manusia antara gender. Di bidang pendidikan misalnya, capaian angka melek huruf penduduk perempuan dewasa di Propinsi Jawa Barat sebesar 91,32 persen, jauh tertinggal dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang mencapai 96,49 persen. Begitu pula pada rata-rata lama sekolah, penduduk perempuan baru mencapai 6,79 tahun jauh lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki, yaitu sebesar 7,81 tahun. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut tentunya diperlukan kebijakan-kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang lebih berpihak pada perempuan. Misalnya, memberikan akses yang lebih mudah pada penduduk perempuan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, dan memprioritaskan beasiswa pada penduduk perempuan.
 - e. Jawa Barat merupakan daerah terbesar di Indoensiadengan kasus kekerasan seksual mencapai 51 persen. Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenag PP dan PA) pada 2009. Hal ini merupakan dampak dari pornografi dan pornoaksi. Tahun 2013 ini merupakan tahun keprihatinan yang amat dalam bagi Indonesia, karena lembaran bulan baru dibuka dengan melesatnya kasus kekerasan seksual di kalangan anak di negeri ini. Sepanjang Januari 2013, sudah terjadi 25 kasus perkosaan dan dua kasus pencabulan. Dengan 29 jumlah korban dan 45 orang pelaku. Bukan hanya itu, dalam bulan Januari 2013 itu pula telah terjadi 5 kasus perkosaan massal, dan tiga diantaranya dilakukan sejumlah pelajar. Data dari Indonesia Police Wach-2013 menyebutkan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai daerah terawan kasus perkosaan. Korban terbanyak berusia 1-16 tahun. Sedangkan pelaku sebagian besar berusia 14-39 tahun. Maka Jelas sekali terkait dengan seksualitas, pornografi telah berhasil mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap seksualitas. Pandangan yang dipengaruhi bukannya semakin membaik, namun justru pandangan yang semakin buruk dalam seksualitas. Era sekarang telah membawa generasi muda, terutama remaja pria, ke dalam era kekerasan seksual yang tidak mustahil akan menuju ke pelecehan seksual dan perkosaan. Bisa dimaklumi jika perkosaan meningkat akhir-akhir ini, berbanding lurus dengan semakin mudahnya akses kepada pornografi. Pornografi secara perlahan telah mempengaruhi pandangan seksualitas, perilaku dan sikap masyarakat terhadap kaum perempuan.

Pembagian peran yang kaku secara langsung atau tidak langsung telah menyebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebutuhan perempuan akan pengembangan diri dan aktualisasi diri terabaikan. Menjadi ibu rumah tangga tugasnya sangat rutin dari hari ke hari pekerjaan yang dilakukan itu-itu saja. Banyak perempuan merasa bahwa pekerjaan ini tidak merangsang perkembangan intelektual dan kepribadiannya, terutama bagi perempuan yang berpendidikan tinggi (Istiadah, 1999).

- b. Perempuan tertinggal dari laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai akibat adanya pembagian kerja yang menempatkan perempuan hanya menjadi Ibu rumah tangga, terbukti telah menyebabkan perempuan tertinggal dalam bidang pendidikan. Ketertinggalan ini berimbas pada tertinggalnya perempuan dalam pekerjaan dan prestasi membangun peradaban. Partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan sangat rendah dibandingkan laki-laki.
- c. Menimbulkan beban ganda. Bagi perempuan kelas menengah ke atas, tugas kerumahtanggaan tidak menjadi masalah karena ada pembantu. Tapi bagi perempuan kelas bawah, mereka harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sendirian sepuluhang bekerja.

4. Kesimpulan

Upaya dan usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan eksistensi dan partisipasi perempuan muslim dalam pembangunan sumber daya manusia diantaranya adalah adanya keberpihakan kebijakan dan peluang pendidikan yang lebih besar terhadap kaum perempuan; daya dukung para orang tua dan keluarga dalam menyekolahkan anak perempuan; dan adanya perubahan sikap dari orang tua terhadap pola pikir tidak membedakan kaum perempuan dan laki-laki dalam pendidikan

Daftar Pustaka

- Afza, N., & Khurshid, A. (2001). *Mempersoalkan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ali, I. F. (2009). *Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*. Jakarta
- Amalia, L. (2012). *Profil Wanita Indonesia*. Jakarta: Tribunnew
- Aroma, E. M. (2003). *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Asy-Syadzili, K. (2008). *Inspring Women Rahasia di Balik wanita Sukses*. Jakarta: Khalifa Pustaka.
- asy-Syinqithi, M. S. M. A. (1995). *Adhwâ-ul Bayân fi Îdhâhil-Qur`ân bil-Qur`ân*. Mesir: Maktabah
- Athibi, U. (2001). *Wanita mengapa merosot akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azra, A. (2008). *5 Tantangan Abadi terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*. Bandung: Mizan
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Profil Anak Indonesia 2012*. Jakarta
- Badudu, J. S. (1996). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar
- Batara, R. M. (2000). *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: dalam Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: LBH APIK
- Beiharz, P. (2005). *Teori-Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Burhanuddin, J. (2002). *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, D. K. (2003). *Martabat dan Keterwakilan Perempuan*. Jakarta: Republika, 18 April 2003
- Diana, P. R. (1998). *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Dzuhayatin, S. R., & Eja, S. Y. (2002). *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik*. Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dengan Ford Foundation

- Fauzi, M. R. (2012). *Wanita yang Dirindukan Surga*. Bandung: Mizan Media Utama
- Gomes, C, F. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Husen, M. (2011). *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima
- Murdah, S. M. (2005). *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*. Bandung: Mizan Utama Muda.
- Murdah, S. M., & Farida, A. (2005). *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Murdah, S. M., & Marzani. (2001). *Keadilan dan Kesetaraan Gender*. Jakarta: LKAJ.
- Ndaraha, T. (1999). *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nunuk, A. P. M. (2004). *Getar Gender*. Magelang: Indonesia Tera
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Ainisyifa, H. (2017). Conceptual Framework of Corporate Culture Influenced on Employees Commitment to Organization. *International Business Management*, 11(3), 826-803.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(1), 47-56.
- Ramdhani, M. A. (2014). Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 8(1), 27-36.
- Ramdhani, M. A., & Muhammadiyah, H. (2015). The Criteria of Learning Media Selection for Character Education in Higher Education. *International Conference of Islamic Education in Southeast Asia*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2014). Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(2), 11-19.
- Ramdhani, M. A., & Santosa, E. (2012). Key Succes Factors for Organic Farming Development. *International Journal of Basic and Applied Science*, 1(1), 7-13.
- Rauf, H. I. (1997). *Wanita dan Politik Pandangan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ridha, M. R. (1948). *Tafsir Al-Manar*, Kairo: Dar Al-Manar
- Rossatria, E. (2006). *Kaum Perempuan akan Mengalami Kemunduran lagi*. Jakarta: Rahima Swara.
- Susanti, M. B. (2000). *Penelitian Tentang Perempuan dari Pandangan Androsentris ke Perspektif Gender*. Yogyakarta
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'ân*. Jakarta: Paramadina.
- Yunigtyas, E. S. (1999). Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Suatu Kontruksi Pemberdayaan atau Memberdayakan Perempuan. *Jurnal ISIP*. Vol. 11, Desember 1999